



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AGUS PUJIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 761039

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.195.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102.5 m2/102.5 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/340 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.575.000.000
3. Tanah Seluas 1434 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 142.000.000

1. MOBIL, NISSAN JUKE CROSSOVER/REVOLT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT/STREET Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 175.840.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 78.302.405

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 195.856.786

**Sub Total** Rp. 2.786.999.191

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.786.999.191

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.